

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sejak timbulnya krisis ekonomi yang dipicu oleh adanya krisis moneter pada pertengahan 1997, menyebabkan pembangunan di Indonesia terhenti dan mengalami penghambatan. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan dari pihak pemerintah untuk membiayai setiap pembangunan yang akan dilakukan. Krisis ekonomi ini memunculkan beberapa kelemahan perekonomian di Indonesia. Diantaranya yaitu kurang meratanya penyebaran pelaksanaan pembangunan antar daerah di Indonesia baik antar wilayah perkotaan maupun pedesaan.

Pelaksanaan pembangunan kemudian dilakukan dengan menitikberatkan pembangunan di pusat dan kurang memperhatikan pembangunan yang dilakukan di daerah. Yang berdampak pada pembangunan di daerah menjadi terbengkalai dan tidak seiring dengan pembangunan di pusat, sehingga membuat potensi ekonomi mengarah ke pusat.

Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah beserta UU No. 24 Tahun 2005, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi memberlakukan status otonomi daerah kepada daerah otonom dan mencabut UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan Daerah. Kebijakan Desentralisasi yang tertuang dalam UU nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah diharapkan akan lebih

memberi peluang pada perubahan kehidupan pemerintah daerah yang demokratis yang gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan (Azhar : 2008).

Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Adhidian : 2007). Hal ini dimaksudkan agar dengan adanya pemberlakuan otonomi daerah diharapkan agar pemerintah daerah dapat menciptakan kemandirian dan dapat mengurus kegiatan pembangunan daerahnya sendiri tanpa lagi tergantung terhadap pusat. Diharapkan dengan pemberlakuan otonomi daerah ini, bisa menjadi alat pendorong untuk bisa mensukseskan pembangunan daerah untuk menggantikan sistem yang lama yang menjadi alasan utama dalam kelambatan pembangunan daerah.

Di dalam pelaksanaan Otonomi Daerah terdapat empat elemen penting yang diserahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Ke empat elemen tersebut menurut Cheema dan Rondinelli adalah Desentralisasi Politik, Desentralisasi Fiskal, Desentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Ekonomi (Adhidian : 2007). Keempat elemen tersebut menjadi kewajiban daerah untuk mengelola secara efisien dan efektif. Sehingga dengan demikian akan terjadi kemampuan / kemandirian suatu daerah untuk melaksanakan fungsinya dengan baik. Salah satu elemen yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal yang merupakan komponen utama dari desentralisasi pelaksanaan otonomi daerah dan menandai

dimulainya babak baru dalam pembangunan daerah serta masyarakatnya dalam mengelola sumber daya / segenap potensi yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah.

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menjalankan pembangunan daerahnya sendiri semakin besar, sejalan dengan pemberlakuan otonomi daerah. Dimana pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab yang besar dalam menjalankan pembangunan daerah, dimana harus menjalankan roda keuangannya sendiri dengan cara bagaimana, untuk bisa menggali sumber-sumber keuangan daerah untuk dapat membiayai kebutuhan keuangan daerah tanpa harus terus tergantung terhadap subsidi yang diberikan oleh pusat. Sehingga nantinya kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dapat dilihat pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pembangunan dan pengembangan semua potensi-potensi daerah yang dimiliki daerah itu.

Salah satu ciri utama daerah mampu dalam melaksanakan otonomi daerah adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin mengecil dan diharapkan Pendapatan Asli Daerah harus menjadi alat utama dalam dana pembangunan daerah. Hal itu menunjukkan bahwa keuangan merupakan faktor penting dalam melaksanakan pembangunan daerah. Namun perlu disadari bahwa tingkat keuangan dari tiap daerah sudah tentu berbeda-beda, ini dikarenakan berbedanya potensi-potensi yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah. Selain itu juga, perbedaan

tingkat kemampuan dari para pemerintah daerah dalam mengolahnya yang menjadi pemicu perbedaan tersebut.

Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebuah kabupaten di Provinsi Gorontalo, yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007. Pembentukan kabupaten ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui otonomi daerah. Dimaksudkan agar kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut bisa terwujud berdasarkan upaya pemerintah daerah tanpa bergantung terhadap pemerintah pusat. Salah satu masalah yang timbul dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah pada bidang perkembangan kemampuan keuangan dimana masih terdapat beberapa persoalan, salah satunya yaitu pada kemampuan pendapatan daerah dalam mengimbangi belanja daerah pada tiap tahun anggaran. Hal ini dapat dilihat dari realisasi APBD Kabupaten Gorontalo Utara seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1

APBD Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2008-2010

	Anggaran		
	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010
Pendapatan	151.900.678.632,00	286.255.470.867,00	327.688.534.984,00
Belanja	154.209.047.071,00	314.666.292.386,00	365.533.047.839,00

Sumber : DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara 2012

Dari tabel diatas, terlihat bahwa jumlah anggaran pendapatan dari Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2008 dan pada tahun-tahun berikutnya bertambah. Begitu pula anggaran terhadap belanja yang juga turut naik dan tidak sebanding dengan jumlah pendapatan daerah. Dimana pada tahun 2008, memperoleh defisit 2.308.368.439, tahun 2009 memperoleh defisit 28.410.821.519 dan pada tahun 2010 sebesar 37.844.512.855. dengan demikian terlihat bahwa pendapatan daerah tidak mengimbangi besarnya belanja daerah pada tiap tahun anggaran. dimana tingkat perkembangan kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari segi kemampuan pendapatan daerah terhadap belanja daerah.

Oleh sebab itu, berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian berkaitan dengan: **“Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Gorontalo Utara.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Belum maksimalnya perkembangan kemampuan keuangan daerah di kabupaten Gorontalo Utara pada tiap tahun anggaran.
- 2) Kurangnya kemampuan pendapatan daerah dalam mengimbangi belanja daerah yang berdampak pada perkembangan kemampuan keuangan daerah di kabupaten Gorontalo Utara dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Apakah terdapat perkembangan kemampuan keuangan daerah di kabupaten Gorontalo Utara dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah ?”

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui “ sejauh mana tingkat perkembangan kemampuan keuangan di Kabupaten Gorontalo Utara dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah”.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumber informasi atau dapat dipakai sebagai bahan sumbangan pemikiran tentang tingkat kemampuan perkembangan keuangan pada pemerintah daerah kabupaten Gorontalo Utara dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

2. Manfaat Teoritis

a) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara

Harapan peneliti, hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dalam perencanaan pembangunan selanjutnya dan pengambilan keputusan pembangunan dalam

rangka meningkatkan kemampuan perkembangan keuangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

b) Bagi Universitas Negeri Gorontalo

Sebagai bahan referensi dan bacaan untuk pengembangan penelitian selanjutnya serta dapat meningkatkan relevansi kurikulum berbagai program pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo dengan Pemerintah Daerah.

c) Bagi Penulis

Untuk melatih ketajaman analisis dan meningkatkan ilmu pengetahuan terhadap kondisi riil lapangan yang terkait serta untuk mengetahui tingkat kemampuan perkembangan keuangan di Kabupaten Gorontalo Utara dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah.